



Judul : Banyak Yang Rentan Ekonomi, Soal Kemiskinan Belum Beres Nih
Tanggal : Sabtu, 20 Mei 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Banyak Yang Rentan Ekonomi Soal Kemiskinan Belum Beres Nih

BEBERAPA waktu lalu Bank Dunia merilis laporan bertajuk 'Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security'. Di sana dilaporkan, terjadi penurunan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia dalam 20 tahun terakhir dari 19% di tahun 2002 menjadi 1,5% pada 2022.

Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengapresiasi pencapaian tersebut sekaligus memberikan sejumlah catatan. Bahwa, perhitungan yang dilakukan oleh Bank Dunia masih menggunakan asumsi *Purchasing Power Parity* (PPP) sebesar 1,9 dolar AS per kapita per hari.

"Sedangkan saat ini World Bank sudah menggunakan asumsi PPP sebesar 2,15 dolar AS per kapita per hari, jika menggunakan asumsi terbaru tentu angka kemiskinan ekstrem kita bertambah" tutur wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR itu, kemarin.

Dia berharap Pemerintah lebih responsif dan menyiapkan program pengentasan kemiskinan ekstrem dengan fokus dan tepat sasaran. Fokusnya tetap mencakup rumah tangga yang secara ekonomi tidak aman dan rentan jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Dia bilang, Bank Dunia sendiri telah menaikkan ketentuan batas untuk kelas peng-

hasilan menengah ke bawah (*lower middle-income class*) dari 3,20 dolar AS menjadi 3,65 dolar AS per orang per hari. Ketentuan itu berdampak pada penghitungan ekonomi Indonesia.

"Sekiranya batas kelas penghasilan menengah bawah dinaikkan seperti saran Bank Dunia dari 3,2 dolar AS menjadi 3,65 dolar AS per kapita per hari, maka akan terlihat penduduk sangat rentan secara ekonomi. Apabila terjadi guncangan seperti pandemi atau kondisi ekonomi lainnya, mereka dengan cepat jatuh di bawah garis kemiskinan" ujarnya.

Politisi PKS tersebut juga mengingatkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 menetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7% hingga 6,5%, atau 18,34 juta sampai 19,75 juta penduduk pada akhir tahun 2024. Melihat pencapaian yang ada, Anis menilai, program pengentasan kemiskinan Pemerintah selama ini masih belum efektif dan belum tepat sasaran.

Per September 2022, lanjutnya, BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai sebesar 26,36 juta atau 9,57% artinya masih jauh dari target 7%. Bahkan angka kemiskinan di 14 provinsi masih berada di atas rata-rata nasional. ■ KAL